

ISBN : 978-602-61430-6-8

PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL BERBASIS POTENSI DAERAH

Oleh :

M. TAUFIQ, SUKIRMIYADI DAN MARSETO

Penerbit : Mitra Sumber Rejeki

PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL BERBASIS POTENSI DAERAH

Oleh :

M. TAUFIQ

SUKIRMIYADI

MARSETO

Penerbit : Mitra Sumber Rejeki

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Berbasis Potensi Daerah

Penulis : M. Taufiq

Sukirmiyadi

Marseto

ISBN : 978-602-61430-6-8

Editor :

Prof. Dr. Djohan Mashudi, SE, MS

Desain Sampul dan Tata Letak :

Wahyu Santoso, SP. MMA

Redaksi :

Jl. Gunung Anyar Tambak IV Kav 28

Surabaya, 60294

Telp. 085645662348

Email : pailan53@yahoo.com

Cetakan I, Agustus 2017

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami ucapkan atas kehadiran Allah yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga bias menyelesaikan buku ajar tentang konsep pertumbuhan ekonomi, bias diselesaikan dengan baik.

Potensi sektoral ekonomi daerah adalah suatu kondisi tertentu dimana perekonomian daerah dipetakan berdasarkan sektor usaha dalam PDRB dengan keunggulan-keunggulan tertentu pada setiap sektor usaha. Pengukuran potensi daerah dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat analisis. Alat analisis tersebut meliputi: 1) *Location Quotient (LQ)*, 2) *Shift-Share (S-S)*, 3) *Multiplier Effect*, dan 4) *Tipologi Klassen*

Kami sadari, tak ada gading yang tak retak. Buku ini masih banyak kekurangan dan harus diperbaiki, untuk itu kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca demi memenuhi kebutuhan pembaca. Semoga dengan buku ini bias memberikan manfaat bagi para pembaca dan membantu proses belajar mengajar.

Surabaya, Agustus 2017

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 : PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH.....	1
1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi.....	2
BAB 2 : POTENSI EKONOMI DAERAH.....	10
1. Location Quotien (LQ).....	10
2. Shift Share.....	11
3. Multiplier Efek.....	14
4. Tipologi Klasen.....	15
5. Strategi Berbasis Analisis SWOT.....	16
6. Model Pilihan Strategi.....	18
BAB 3 : TINJAUAN EKONOMI JAWA TIMUR.....	19
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Hal ini berarti bahwa usaha pembangunan tersebut bersifat kompleks, tidak hanya menyangkut kegiatan antar sektoral dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menyangkut kegiatan dalam konteks regional. Setiap kegiatan pembangunan selalu melibatkan dimensi kedaerahan (spasial). Karena itu, kegiatan perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek kedaerahan secara komprehensif. Untuk keperluan tersebut maka diperlukan model perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada aspek sektoral dan aspek keunggulan lokal / daerah.

Pembangunan daerah pada dasarnya mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan akan bertampak pada pertumbuhan ekonomi sektoral dan regional yang menggambarkan perubahan struktur ekonomi yang terjadi. Melalui perencanaan pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor akan tercapai pembangunan daerah yang efisien menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata antar daerah. Berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola kawasannya termasuk kebijakan-kebijakan dalam pembiayaan.

Konsekuensi logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragamannya daerah. Oleh karena itu sudah menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut Todaro (2000) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal (*capital accumulation*) meliputi semua jenis investasi baru baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang

ditanamkan dengan bentuk tanah, peralatan fisik, dan modal sumber daya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar output atau pendapatan di kemudian hari.

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu tumpuan dan harapannya adalah dengan cara menggali dan mengoptimalkan potensi daerah. Pemetaan potensi daerah pada dasarnya merupakan upaya melihat kondisi daerah dari sudut pandang ekonomi. Karena itu, strukturisasi informasi juga didasarkan pada pendekatan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut potensi daerah dilihat berdasarkan dua hal, yaitu pasar dan lingkungan pendukungnya. Sebagai sebuah pasar maka suatu daerah memberikan penawaran dan permintaan. Sementara itu, lingkungan pendukung mencakup keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan, dan faktor keamanan.

Menurut Todaro (2000) pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus pada suatu masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara atau daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi secara nasional ditunjukkan oleh perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan untuk daerah ditunjukkan oleh perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil dari pelaksanaan pembangunan ekonomi mempunyai dampak terhadap terjadinya perubahan sektoral dan regional. Perubahan sektoral ditunjukkan dengan adanya perubahan ketergantungan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan ini juga terjadi pada tenaga kerja yaitu adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Sedangkan perubahan dari sisi regional dapat ditunjukkan dengan adanya daerah yang tumbuh lebih cepat dari daerah lain sehingga menjadi penggerak terhadap pertumbuhan daerah yang relative tertinggal.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi yang dilakukan secara terus menerus pada suatu kesatuan ekonomi. Untuk memahami pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengukur perbedaan atau perubahan produk domestik bruto tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam melakukan analisa perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam

suatu pembangunan ekonomi dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, baik terhadap wilayahnya maupun terhadap wilayah lain. Dalam Teori Klasik Adam Smith menyatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan memperluas pangsa pasar, dan perluasan pasar akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Lebih lanjut, spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga meningkatkan upah dan keuntungan. Dengan demikian, proses pertumbuhan akan terus berlangsung sampai seluruh sumber daya termanfaatkan.

Sementara itu David Ricardo, mengemukakan pandangan yang berbeda dengan Adam Smith. Menurutnya, perkembangan penduduk yang berjalan cepat pada akhirnya akan menurunkan kembali tingkat pertumbuhan ekonomi ke taraf yang rendah. Pola pertumbuhan ekonomi menurut Ricardo berawal dari jumlah penduduk rendah dan sumber daya alam yang relatif melimpah. Keynes melihat pertumbuhan dalam kondisi jangka pendek dan menyatakan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dari suatu negara. Semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan, semakin besar pendapatan nasional yang diperoleh, demikian juga sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Keynes juga menyatakan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta pengawasan secara langsung. Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan

Menurut Simon dalam Jhingan (2004) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi dalam Sukirno (2006) sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektorekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator

penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008)

Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (*demand*) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor dan impor. Sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Mankiw, 2001: 126). Pertumbuhan biasanya dihitung dalam nilai riil dengan tujuan untuk menghilangkan adanya inflasi dalam harga dan jasa yang diproduksi sehingga PDB riil mencerminkan perubahan kuantitas produksi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, digunakanlah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. Secara teori, PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman konsep, definisi dan metoda yang dipakai di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui indikator pertumbuhan PDB atau PNB dari tahun ke tahun. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Mankiw, 2001: 126).

Berdasarkan lapangan usaha, PDRB dibagi ke dalam sembilan sektor, sedangkan secara makro ekonomi dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Dikatakan sektor primer apabila outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat bergantung kepada alam. Yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor

pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang inputnya berasal dari sektor primer, yang meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor konstruksi. Sedangkan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam sektor tersier. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan disajikan dalam dua bentuk yaitu penyajian atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian atas dasar harga berlaku menunjukkan besaran nilai tambah bruto masing-masing sektor sesuai dengan keadaan pada tahun yang sedang berjalan. Penilaian terhadap produksi, biaya antara dan nilai tambahnya dilakukan dengan menggunakan harga berlaku pada masing-masing tahun

Metode yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi tiga yaitu laju pertumbuhan ekonomi tahunan dengan formula: (Tambunan , 2001)

$$\Delta PDB(t) = PDB(t) - PDB(t-1) / PDB(t-1) \times 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun selama periode waktu tertentu digunakan formula:

$$r = n-1 \gamma t_n / t_0 - 1 \times 100\%$$

atau dengan menggunakan pendekatan compounding factor:

$$t_n = t_0 (1 + r)^{n-1}$$

Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari sisi pertumbuhan *aggregate demand* atau dari sisi *aggregate supply*. Dari sisi *agregat demand*, pertumbuhan ekonomi bisa disebabkan karena meningkatnya permintaan konsumsi masyarakat, pengeluaran investasi perusahaan dan belanja pemerintah. Sisi *agregat demand* dalam perekonomian dapat digambarkan dalam model ekonomi makro sebagai (Tambunan, 2001):

$$Y = C + I + G + X - M$$

$$C = C_0 + c_0Y; \quad I = I_0 - ir; \quad G = G_0; \quad X = X_0; \quad M = M_0 + My$$

Dimana: Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi Masyarakat

I = Investasi perusahaan

G = pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Import

i = Tingkat Bunga

Nilai investasi sangat ditentukan oleh tingkat bunga di dalam negeri, selain ditentukan juga oleh faktor yang bersifat otonom (I_0). Semakin tinggi tingkat bunga (i) semakin mahal biaya (*opportunity cost*) investasi, semakin kecil jumlah investasi. Volume ekspor di anggap tetap dengan asumsi negara kecil karenanya ekspor lebih ditentukan oleh factor-faktor eksternal seperti permintaan di luar negeri. Sedangkan impor ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka permintaan impor akan naik baik untuk permintaan import yang terdiri dari barang dan jasa untuk keperluan konsumsi maupun untuk proses produksi dalam negeri (Tambunan, 2001)

Sedangkan dari sisi *agregat supply*, para ekonom aliran klasik yang telah mempelajari gejala pertumbuhan ekonomi, melihat bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan teori telah diperkenalkan dengan fungsi produksi (Pratama dan Manurung, 2008: 136):

$$Q = f(K, L, T, U)$$

dimana:

Q = output atau PDB

K = barang modal

L = tenaga kerja

T = teknologi

U = uang

$$\partial Q / \partial K; \partial Q / \partial L; \partial Q / \partial T; \partial Q / \partial U \geq 0$$

Persamaan diatas secara sederhana menunjukkan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. (Pratama dan Manurung, 2008: 136-137)

Cara penghitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu: Pendekatan Produksi, yaitu jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu satu (tahun). Unit-unit Produksi tersebut dalam penyajiannya dapat dikelompok menjadi sector-sector atau lapangan usaha.

Pendekatan Pengeluaran, yaitu penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yang meliputi Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, Perubahan stok; dan Ekspor neto yaitu ekspor dikurangi impor dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pendekatan Pendapatan yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Balas jasa dari factor-faktor produksi ini berasal dari penjumlahan sewa, bunga, upah dan laba. (Kuncoro, 2006: 27).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor - faktor penting sebagai berikut (Arsyad, 1999:214):

a) Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik dan sumberdaya manusia (human resources), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumberdaya - sumberdaya yang baru dan akan meningkatkan sumberdaya - sumberdaya yang telah ada.

b) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara produktif. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang negatif, contohnya angka pengangguran meningkat.

c) Kemajuan Teknologi

Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara - cara baru dan cara - cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan - pekerjaan tradisional.

Setiap pembangunan daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya dengan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Syafrijal, 2008).

Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, sarana dan prasarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah,

kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas (Adisamita, 2008).

Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, dari segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilakukan di daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Kedua, dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Ketiga, pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahan. Tujuan pembangunan daerah hanya dapat dicapai apabila pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu pembangunan daerah merupakan suatu usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka semakin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab (Sjafrizal, 2008). Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak boleh bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi pada hakikatnya perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh tiap daerah merupakan pelengkap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu membuat suatu program untuk mendistribusikan proyek-proyek ke berbagai daerah dengan tujuan memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha pemerintah untuk membangun.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan variabel ekonomi dari suatu subsistem spasial suatu wilayah dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu daerah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi di daerah tersebut (Tarigan, 2005). Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi daerah.

Hal ini dikarenakan dalam otonomi daerah masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan bagi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Sjafrizal, 2008). Perhitungan pendapatan daerah pada awalnya dibuat pada harga berlaku, namun agar dapat melihat dari kurun waktu ke waktu berikutnya harus dinyatakan dengan nilai riil, artinya dinyatakan dalam nilai konstan. Pendapatan daerah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan

teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu daerah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di daerah tersebut oleh seberapa besar terjadinya transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar daerah atau mendapat aliran dari luar daerah (Septa, 2007)

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Penerbit Kuraiko Pratama, Bandung.
- _____, 2014, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
- Basri, 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI (Distorsing, Peluang dan Kendala)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dasril, Henry & Hessel, 2004, *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta
- Elmi, Bchrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta
- Ibnu Syamsi, 1993, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, cetakan kedua, Penerbit PT. Bina Aksara Jakarta.
- Khusaini, 2006, *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Penerbit BPFE UNIBRAW, Malang.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Permendagri, No 27 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
- Permendagri, No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Saragih, Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia
- Stat. Daniel dan Inge Hovlan, 2012, <http://Subliyanto.wordpress.com/2012/12/13/analisis-swot/>,
- Syafrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma LP3ES, 3,27-38
- Syafrizal, 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Baduose Media.
- Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi. Jakarta. Bumi Aksara